

## ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA

### Sri Endang Rahayu

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan  
e-mail : sriendang@umsu.ac.id

#### Abstrak

Proses Pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang stabil dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2019 sebesar 4%-6%, hanya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat turun drastis yang berdampak kepada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 4%, Tapi sangat disayangkan di mana pertumbuhan ekonomi ini malah membuat ketimpangan distribusi pendapatan rakyat semakin lebar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis variabel ketimpangan distribusi pendapatn di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS) yaitu data ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari gini ratio dari tahun 2010 sampai tahun 2020. PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019, dan mengalami penurunan di tahun 2020. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat distribusi pendapatan lebih merata, malah ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar, yang dilihat dari koefisien gini Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar di kisaran 0,406-0,41. Namun di tahun 2016 sampai 2020 koefisien gini Indonesia turun, sudah di bawah dari 0,40 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,307 dan di tahun 2020 menjadi 0,381.

**Kata Kunci** : Distribusi pendapatan, Ketimpangan distribusi pendapatan, Koefisien gini.

#### PENDAHULUAN

Istilah pembangunan di Indonesia sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Upaya untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya baru nyata tampak sejak Pelita III, dimana strategi pembangunan diubah dengan menempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan yaitu : (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang dan perumahan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pembagian pendapatan; (4) kesempatan kerja; (5) kesempatan berusaha; (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) penyebaran pembangunan; dan (8) kesempatan memperoleh keadilan (Dumairy, 2006).

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan

sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya (Sita Tiara, 2016).

Proses Pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang stabil dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2019 sebesar 4%-6%, hanya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat turun drastis yang berdampak kepada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020

| No | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|----|-------|-------------------------|
| 1  | 2011  | 6,17                    |
| 2  | 2012  | 6,03                    |
| 3  | 2013  | 5,56                    |
| 4  | 2014  | 5,01                    |
| 5  | 2015  | 4,88                    |
| 6  | 2016  | 5,03                    |
| 7  | 2017  | 5,07                    |
| 8  | 2018  | 5,17                    |
| 9  | 2019  | 5,02                    |
| 10 | 2020  | 2,97                    |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 4% dari tahun 2011-2019, Indonesia pun menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tapi sangat disayangkan di mana pertumbuhan ekonomi ini malah membuat ketimpangan distribusi pendapatan rakyat semakin melebar. Dari sisi sosial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia sesuai kebutuhan mereka sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran (Sita Tiara, 2016).

Pembangunan ekonomi yang terjadi di setiap daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonominya. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan pendapatan per kapita yang tinggi bukan hanya menyebabkan wilayah semakin maju tetapi juga mempengaruhi daerah-daerah lain yang kurang maju menjadi lebih maju lagi (Adisasmita, 2005; Kuncoro, 2004; Sjafrizal, 2008). Sementara itu ketimpangan berhubungan dengan pertumbuhan dan ketimpangan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Maipita, 2014). Atau dengan kata lain, distribusi pendapatan yang relatif merata akan mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Elvis F. Purba, 2020).

Menurut kriteria Bank dunia, bank dunia membagi 3 lapisan penduduk yaitu 1) 40% penduduk berpendapatan terendah, 2) 40% penduduk berpendapatan menengah dan 3) 20%

penduduk berpendapatan tertinggi. Di lihat dari survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012, di mana tahun 2011, 40% penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati 16,85% pendapatan nasional. Sementara 40% penduduk berpendapatan menengah menikmati 34,73% dan yang paling besar menikmati pendapatan yaitu 20% penduduk yang berpendapatan tertinggi yaitu sebesar 48,42%.

Jika dilihat dari data koefisien gini/Gini ratio Indonesia, tahun 2011 sampai tahun 2015 dimana koefisien gini sebesar di kisaran 0,406-0,41. Inilah koefisien gini yang tertinggi yang pernah terjadi Indonesia, dimana tahun-tahun sebelumnya koefisien gini Indonesia di bawah dari 0,40. Artinya distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang atau tidak merata. Namun di tahun 2016 sampai 2020 koefisien gini Indonesia turun, sudah di bawah dari 0,40 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,307 dan di tahun 2020 menjadi 0,381.

**Tabel 2.** Gini Ratio Indonesia Tahun 2011-2020

| No | Tahun | Gini Ratio Indonesia |
|----|-------|----------------------|
| 1  | 2011  | 0,41                 |
| 2  | 2012  | 0,41                 |
| 3  | 2013  | 0,413                |
| 4  | 2014  | 0,406                |
| 5  | 2015  | 0,408                |
| 6  | 2016  | 0,397                |
| 7  | 2017  | 0,393                |
| 8  | 2018  | 0,389                |
| 9  | 2019  | 0,380                |
| 10 | 2020  | 0,381                |

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS), 2021.

## LANDASAN TEORI

### Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan (Sita Tiara, 2016)

### Distribusi Pendapatan

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara & tolak ukur baik dengan pendekatan ekonomi maupun non ekonomi. Penilaian dari pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan aspek pendapatan dengan tolak ukur pendapatan perkapita. Tolak ukur pendapatan

perkapita belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan, karena merupakan konsep rata-rata. Sehingga unsur pemerataan atau keadilan tidak terpantau (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa kriteria/tolak ukur untuk menilai pemerataan distribusi yaitu ada 3 yang paling lazim digunakan (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020) adalah :

1. Kurva Lorenz
2. Indeks/koeffisien gini
3. Kriteria Bank Dunia

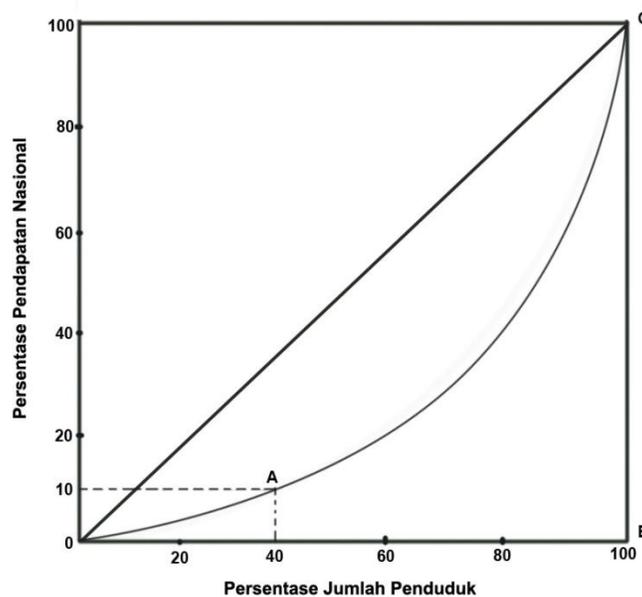
Keterangan :

1. Kurva Lorenz

Kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar, yang vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional sedangkan yang horizontal persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada garis diagonal utama bujur sangkar tersebut.

Kurva lorenz yang semakin dekat ke garis diagonal (semakin lurus) mencerminkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal (semakin lengkung) maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk (distribusi pendapatan nasional semakin timpang/tidak merata).

Kurva Lorenz dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 1.** Kurva Lorenz

2. Koefisien Gini/Rasio Gini

Koefisien gini adalah Koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1 yang menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil (mendekati nol)

koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi pendapatannya, semakin besar (mendekati satu) koefisiennya pertanda semakin timpang/senjang distribusi pendapatannya.

### 3. Kriteria Bank Dunia

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk yaitu : 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi.

Ketimpangan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketimpangan distribusi dinyatakan sedang/moderat apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Ketimpangan distribusi dinyatakan lunak/cukup merata apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional.

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia ini sering pula dipakai sebagai kriteria kemiskinan relatif. Isu pemerataan dan pertumbuhan kini masih menjadi debat tak berkesudahan dalam konteks pembangunan yaitu efektivitas dan efisiensi.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan**

Simon Kuznets (Todaro, 2011)) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” (Hipotesis Kuznets).

Pembuktian hipotesis Kuznets dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan (Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.

Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Jadi, walaupun Kuznets tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U-terbalik ini, secara prinsip hipotesis tersebut konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan ekonomi. Namun terlihat bahwa, dampak pengayaan sektor tradisional dan modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah.

### **Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan**

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020) adalah sebagai berikut :

#### a. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi ilayah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena

proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

b. Alokasi Investasi

Kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah.

c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar propinsi juga merupakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

d. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

e. Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki

produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS) yaitu data ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari ratio gini dari tahun 2011 sampai tahun 2020.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi (Sita Tiara, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai peningkatan PDRB per kapita Indonesia. PDB per kapita Indonesia dilaporkan sebesar 3.917, 087 USD pada tahun 2020. Rekor ini turun dibanding tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 4.192,736 USD. Data PDRB per kapita Indonesia diperbaharui tahunan, dengan rata-rata 3.687,751 USD dari tahun 2010 sampai tahun 2021 (CEIC Data, 2021). Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4.192,736 USD pada tahun 2019 dan rekor terendah sebesar 3.178,704 USD pada tahun 2010.

**Tabel 3.** PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010-2020

| No | Tahun | PDB Per Kapita Indonesia (USD) |
|----|-------|--------------------------------|
| 1  | 2010  | 3.178,704                      |
| 2  | 2011  | 3.178,704                      |
| 3  | 2012  | 3.740,869                      |
| 4  | 2013  | 3.667,690                      |
| 5  | 2014  | 3.531,639                      |
| 6  | 2015  | 3.368.134                      |
| 7  | 2016  | 3.604.887                      |
| 8  | 2017  | 3.885,976                      |
| 9  | 2018  | 3.945,286                      |
| 10 | 2019  | 4.192,736                      |
| 11 | 2020  | 3.917,087                      |

Sumber : CEIC, 2021.

### Gambaran Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97% yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat turun drastis yang berdampak kepada penurunan tingkat pertumbuhan

ekonomi. Namun di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2010-2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang stabil dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4%-6%. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti distribusi pendapatan masyarakat sudah merata. Malah ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar, dimana jurang (gap) antara penduduk kaya dengan penduduk miskin semakin lebar. Dimana untuk melihat merata tidaknya distribusi pendapatan dapat dilihat dari data gini ratio Indonesia.

Jika dilihat dari data koefisien gini/Gini ratio Indonesia, tahun 2011 sampai tahun 2016 dimana koefisien gini sebesar di kisaran 0,406-0,41. Inilah koefisien gini yang tertinggi yang pernah terjadi Indonesia, dimana tahun-tahun sebelumnya koefisien gini Indonesia di bawah dari 0,40, artinya distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang atau tidak merata. Namun di tahun 2016 sampai 2020 koefisien gini Indonesia turun, sudah di bawah dari 0,40 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,307 dan di tahun 2020 menjadi 0,381. Dilihat dari nilai gini ratio di kisaran 0,307 sampai 0,41, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dikatakan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan tetapi tidak terlalu melebar karena angkanya tidak mendekati satu tapi mendekati angka nol.



**Gambar 2.** Koefisien Gini di Indonesia Tahun 2011-2020

Ketimpangan distribusi pendapatan untuk propinsi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan distribusi pendapatan di propinsi yang semakin melebar yang koefisien gininya melebihi koefisien gini Indonesia, peringkat tertinggi di tahun 2020 adalah propinsi DI Yogyakarta dimana koefisien gininya mencapai 0,434, kemudian disusul oleh propinsi Gorontalo sebesar 0,408 dan disusul lagi propinsi Jawa Barat sebesar 0,403. Propinsi yang nilai koefisien gininya rendah atau lebih merata dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya pada tahun 2020 adalah propinsi Kalimantan Utara dimana koefisien gininya hanya sebesar 0,292, kemudian Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,262 dan disusul oleh Propinsi Sumatera Barat sebesar 0,305. Untuk melihat data koefisien gini propinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Koefisien Gini Propinsi di Indonesia Tahun 2011 -2020

| Propinsi             | Tahun       |             |              |              |              |              |              |              |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                      | 2011        | 2012        | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019        | 2020         |
| ACEH                 | 0.326       | 0.32        | 0.341        | 0.325        | 0.334        | 0.333        | 0.329        | 0.325        | 0.32        | 0.323        |
| SUMATERA UTARA       | 0.347       | 0.332       | 0.354        | 0.321        | 0.336        | 0.319        | 0.315        | 0.318        | 0.32        | 0.316        |
| SUMATERA BARAT       | 0.353       | 0.364       | 0.363        | 0.334        | 0.342        | 0.331        | 0.318        | 0.321        | 0.31        | <b>0.305</b> |
| RIAU                 | 0.363       | 0.404       | 0.374        | 0.353        | 0.364        | 0.347        | 0.325        | 0.327        | 0.33        | 0.329        |
| JAMBI                | 0.34        | 0.345       | 0.348        | 0.329        | 0.361        | 0.349        | 0.335        | 0.334        | 0.32        | 0.32         |
| SUMATERA SELATAN     | 0.342       | 0.396       | 0.383        | 0.399        | 0.36         | 0.348        | 0.361        | 0.358        | 0.33        | 0.339        |
| BENGKULU             | 0.36        | 0.354       | 0.386        | 0.356        | 0.376        | 0.357        | 0.351        | 0.362        | 0.34        | 0.334        |
| LAMPUNG              | 0.366       | 0.358       | 0.356        | 0.347        | 0.376        | 0.364        | 0.334        | 0.346        | 0.33        | 0.327        |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 0.301       | 0.294       | 0.313        | 0.303        | 0.283        | 0.275        | 0.282        | 0.281        | 0.27        | <b>0.262</b> |
| KEP. RIAU            | 0.317       | 0.354       | 0.362        | 0.402        | 0.364        | 0.354        | 0.334        | 0.33         | 0.34        | 0.339        |
| DKI JAKARTA          | 0.438       | 0.421       | 0.433        | 0.431        | 0.431        | 0.411        | 0.413        | 0.394        | 0.39        | 0.399        |
| JAWA BARAT           | 0.411       | 0.412       | 0.411        | 0.413        | 0.415        | 0.413        | 0.403        | 0.407        | 0.4         | 0.403        |
| JAWA TENGAH          | 0.383       | 0.383       | 0.387        | 0.376        | 0.382        | 0.366        | 0.365        | 0.378        | 0.36        | 0.362        |
| DI YOGYAKARTA        | 0.401       | 0.434       | 0.439        | 0.419        | 0.433        | 0.42         | 0.432        | 0.441        | 0.42        | 0.434        |
| JAWA TIMUR           | 0.374       | 0.357       | 0.364        | 0.369        | 0.415        | 0.402        | 0.396        | 0.379        | 0.37        | 0.366        |
| BANTEN               | 0.404       | 0.387       | 0.399        | 0.395        | 0.401        | 0.394        | 0.382        | 0.385        | 0.37        | 0.363        |
| BALI                 | 0.407       | 0.431       | 0.403        | 0.415        | 0.377        | 0.366        | 0.384        | 0.377        | 0.37        | 0.369        |
| NUSA TENGGARA BARAT  | 0.363       | 0.348       | 0.364        | 0.377        | 0.368        | 0.359        | 0.371        | 0.372        | 0.38        | 0.376        |
| NUSA TENGGARA TIMUR  | 0.365       | 0.356       | 0.352        | 0.355        | 0.339        | 0.336        | 0.359        | 0.351        | 0.36        | 0.354        |
| KALIMANTAN BARAT     | 0.401       | 0.381       | 0.396        | 0.391        | 0.334        | 0.341        | 0.327        | 0.339        | 0.33        | 0.317        |
| KALIMANTAN TENGAH    | 0.338       | 0.333       | 0.35         | 0.35         | 0.326        | 0.33         | 0.343        | 0.342        | 0.34        | 0.329        |
| KALIMANTAN SELATAN   | 0.37        | 0.378       | 0.359        | 0.359        | 0.353        | 0.332        | 0.347        | 0.344        | 0.33        | 0.332        |
| KALIMANTAN TIMUR     | 0.375       | 0.362       | 0.371        | 0.348        | 0.316        | 0.315        | 0.33         | 0.342        | 0.33        | 0.328        |
| KALIMANTAN UTARA     | -           | -           | -            | -            | 0.294        | 0.3          | 0.308        | 0.303        | 0.3         | <b>0.292</b> |
| SULAWESI UTARA       | 0.386       | 0.427       | 0.422        | 0.424        | 0.368        | 0.386        | 0.396        | 0.394        | 0.37        | 0.37         |
| SULAWESI TENGAH      | 0.376       | 0.4         | 0.407        | 0.372        | 0.374        | 0.362        | 0.355        | 0.346        | 0.33        | 0.326        |
| SULAWESI SELATAN     | 0.405       | 0.41        | 0.429        | 0.425        | 0.424        | 0.426        | 0.407        | 0.397        | 0.39        | 0.389        |
| SULAWESI TENGGARA    | 0.413       | 0.404       | 0.426        | 0.409        | 0.399        | 0.402        | 0.394        | 0.409        | 0.4         | 0.389        |
| GORONTALO            | 0.459       | 0.437       | 0.437        | 0.412        | 0.42         | 0.419        | 0.43         | 0.403        | 0.41        | 0.408        |
| SULAWESI BARAT       | 0.342       | 0.315       | 0.349        | 0.352        | 0.363        | 0.364        | 0.354        | 0.37         | 0.37        | 0.364        |
| MALUKU               | 0.412       | 0.383       | 0.37         | 0.351        | 0.34         | 0.348        | 0.343        | 0.343        | 0.32        | 0.318        |
| MALUKU UTARA         | 0.334       | 0.338       | 0.318        | 0.325        | 0.28         | 0.286        | 0.317        | 0.328        | 0.31        | 0.308        |
| PAPUA BARAT          | 0.416       | 0.425       | 0.431        | 0.439        | 0.44         | 0.373        | 0.39         | 0.394        | 0.39        | 0.382        |
| PAPUA                | 0.419       | 0.439       | 0.442        | 0.408        | 0.421        | 0.39         | 0.397        | 0.384        | 0.39        | 0.392        |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>0.41</b> | <b>0.41</b> | <b>0.413</b> | <b>0.406</b> | <b>0.408</b> | <b>0.397</b> | <b>0.393</b> | <b>0.389</b> | <b>0.38</b> | <b>0.381</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Salah satu penyebab semakin timpangnya distribusi pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Karena laju pendapatan orang miskin tidak bisa mengejar kecepatan tumbuhnya harta dari orang kaya. Harusnya yang menjadi bahan evaluasi adalah pertumbuhan ekonomi agar lebih berkualitas.

Dari sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas 3 kelas. Kelas atas sebesar 20%, kelas menengah sebesar 40%, dan terbawah sebesar 40%. Pada 2005, kelas terbawah yang sebesar 40% itu menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 21%, namun pada 2013 menurun menjadi 16,9%. Sementara untuk kelas atas, pada 2005 menerima 40% dan meningkat menjadi 49% dari PDB pada 2013. Artinya memang yang diterima orang kelas atas jauh lebih besar dari yang kalangan bawah. Sehingga kelas atas ekonominya naik sangat cepat dan kelas bawah juga naik, tapi lambat.

Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Pemerintah harus segera mencari upaya untuk mempersempit ketimpangan tersebut. Karena bisa memberikan efek negatif dari sisi sosial. Pemerintah segera mengubah strategi pembangunan ke depan, mengingat banyak persoalan ekonomi yang dihadapi (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

Kesenjangan ekonomi masyarakat yang masih cukup lebar menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meminimalisasinya meski harus disadari seluruh negara di dunia mengalami koefisien gini yang meningkat juga, akibat industri yang lebih padat modal sehingga peningkatan kekayaan orang kaya lebih tinggi dari perbaikan pendapatan orang miskin.

Mengatasi rapuhnya perekonomian Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi dinilai tidak berkualitas, harus diprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus membuat terobosan baru agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif sehingga mampu mengelola dan mengolah potensi sumber daya alam yang sangat besar di Indonesia. Tantangan ekonomi dunia ke depan sangat berat, terutama dalam menghadapi era persaingan bebas seperti MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Bukan waktunya lagi membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

**Tabel 5.** Gini Ratio di Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2010-2020

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan |
|-------|-----------|-----------|
| 2010  | 0,382     | 0,315     |
| 2011  | 0,422     | 0,34      |
| 2012  | 0,425     | 0,33      |
| 2013  | 0,431     | 0,32      |
| 2014  | 0,428     | 0,319     |
| 2015  | 0,428     | 0,334     |
| 2016  | 0,41      | 0,327     |
| 2017  | 0,407     | 0,32      |
| 2018  | 0,401     | 0,324     |
| 2019  | 0,390     | 0,320     |
| 2020  | 0,393     | 0,317     |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Ketimpangan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat bukan saja berlangsung secara nasional, tetapi bisa juga terjadi secara spasial atau antar lapisan daerah yaitu antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Pada tabel 5, pembagian pendapatan di Indonesia relatif lebih merata di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Dapat dilihat pada koefisien gini antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan untuk tahun-tahun yang sama yang menunjukkan angka koefisien gini di desa lebih kecil dibandingkan koefisien gini di kota.

## SIMPULAN

1. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Indonesia selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data 11 tahun terakhir. PDRB per kapita Indonesia selama tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi meningkat, dimana PDB per kapita yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4.192,736 USD dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 3.917,087 USD.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia yang dilihat dari *Gini Ratio* selama tahun tahun 2011 sampai tahun 2015 dimana koefisien gini sebesar di kisaran 0,406-0,41 yang artinya artinya distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang atau tidak merata. Inilah koefisien gini yang tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Namun di tahun 2016 sampai 2020 koefisien gini Indonesia turun, sudah di bawah dari 0,40 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,307 dan di tahun 2020 menjadi 0,381.
3. Koefisien gini tertinggi di propinsi yang artinya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan propinsi-propinsi yang lain adalah propinsi DI Yogyakarta propinsi Gorontalo dan disusul lagi propinsi Jawa Barat. Dan propinsi yang distribusinya lebih merata dibandingkan propinsi-propinsi yang lain adalah propinsi Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat.
4. Di daerah pedesaan di Indonesia lebih merata dibanding dengan daerah perkotaan di Indonesia dimana koefisien gini di daerah pedesaan lebih kecil daripada koefisien gini di daerah perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, (2005), Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dumairy, (2006), "Perekonomian Indonesia", Jakarta : Erlangga.
- Elvis F. Purba, Ayu Handayani Siregar (2020), Ketimpangan distribusi Pendapatan Antarwilayah di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2016. Jurnal Visi Ilmu Sosial & Humaniora (VISH), Volume.01, No.01 Juli 2020.
- Kuncoro, Mudrajad, (2004), Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta : Erlangga.

- Maipita, Indra, (2014), *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sita Tiara (2016), *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Ekonomikawan*, Volume 16, No.1 (2016).
- Sjafrizal, 2008, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose.
- Sri Endang Rahayu, dkk (2020), *Perekonomian Indonesia*, Medan : Perdana Publishing.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta : Erlangga.
- CEIC, (2021), *Indonesia pdb Per kapita*, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gdp-per-capita>, diakses 1 Juli 2021.